

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2019, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu atau terlibat dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP Tahun 2019 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada tahun 2020. Amin

Luwuk, 17 Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
NIP. 19620912 199603 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

LKJIP Tahun 2019 ini menyajikan ringkasan capaian kinerja dari sasaran dan kegiatan selama tahun 2019. Pada penyusunan LKJIP tahun 2019 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target dalam rencana kerja tahun 2019 dengan realisasinya. Untuk penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya dari indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome* dan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarnya.

Tujuan strategis Dinas Kominfo adalah Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency dan Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel. Dengan sasaran strategis Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika dan Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel. Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2019 Dinas Kominfo telah melaksanakan 12 program dan 47 kegiatan yang didukung alokasi APBD Kabupaten Banggai sebesar Rp. 3.456.179.347,76,- yang kemudian pada momen perubahan anggaran bertambah Rp.250.000.000 menjadi Rp.3.706.179.347,76. Realisasi anggaran Belanja Langsung tahun 2019 adalah sebesar Rp.3.134.121.193 atau 84,56%.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan capaian kinerja terhadap 3 sasaran Dinas Kominfo, rata-rata telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian kami menyadari bahwa, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya persiapan awal secara teknis baik survei dan identifikasi terhadap lokasi pelaksanaan kegiatan maupun kurangnya tenaga teknis / SDM yang dimiliki oleh Dinas Kominfo.

Tantangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika ke depan masih memerlukan upaya dan kerja keras Dinas Kominfo. Apalagi Dinas Kominfo ditargetkan untuk dapat merancang dan mewujudkan konsep Smart City di Kabupaten Banggai pada tahun mendatang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan kegiatan inovasi baru yang dapat ikut meningkatkan SDM aparatur Dinas Kominfo baik melalui diklat formal maupun pelatihan-pelatihan di bidang kominfo yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam mewujudkan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai.

Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi kinerja Dinas Kominfo pada tahun mendatang. Untuk sasaran yang telah mencapai hasil yang diinginkan akan terus dipertahankan dan dikembangkan melalui program dan kegiatan pada tahun 2020. Terima kasih. Semoga bermanfaat

Luwuk, 17 Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
NIP. 19620912 199603 1 002

Daftar Isi

▶	Kata Pengantar	ii
	Ikhtisar Eksekutif	iii
	Daftar Isi	iv
	Daftar Tabel	vi
	BAB I PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
	1.4. Landasan Hukum	7
	1.5. Sistematika Penyusunan	7
	BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
	3.2. Realisasi Anggaran	16
	BAB IV PENUTUP	25
	4.1. Simpulan Umum	25
	4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	26

Daftar Tabel

▼	Tabel 1.1	Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Per 31 Desember 2019).....	4
	Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	9
	Tabel 2.2	Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019	10
	Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	12
	Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	13

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik atau instansi pemerintah diharapkan dapat membuat suatu laporan pertanggungjawaban kinerja organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan ikhtisar pertanggung jawaban yang memuat dan menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2019. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan pelaporan kinerja Tahun 2019 ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2019, sekaligus sebagai alat kendali dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada tahun-tahun mendatang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai merupakan perangkat daerah atau dinas baru hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang serumpun sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan), urusan statistik (Bappeda) dan urusan persandian (Bagian Humas Setda). Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas/kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya aparaturanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/ melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik sesuai asas otonomi dan tugas perbantuan (dari Pemerintah Pusat). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-Government, bidang hubungan media dan sumber daya komunikasi publik (SDKP), bidang persandian dan bidang statistik.

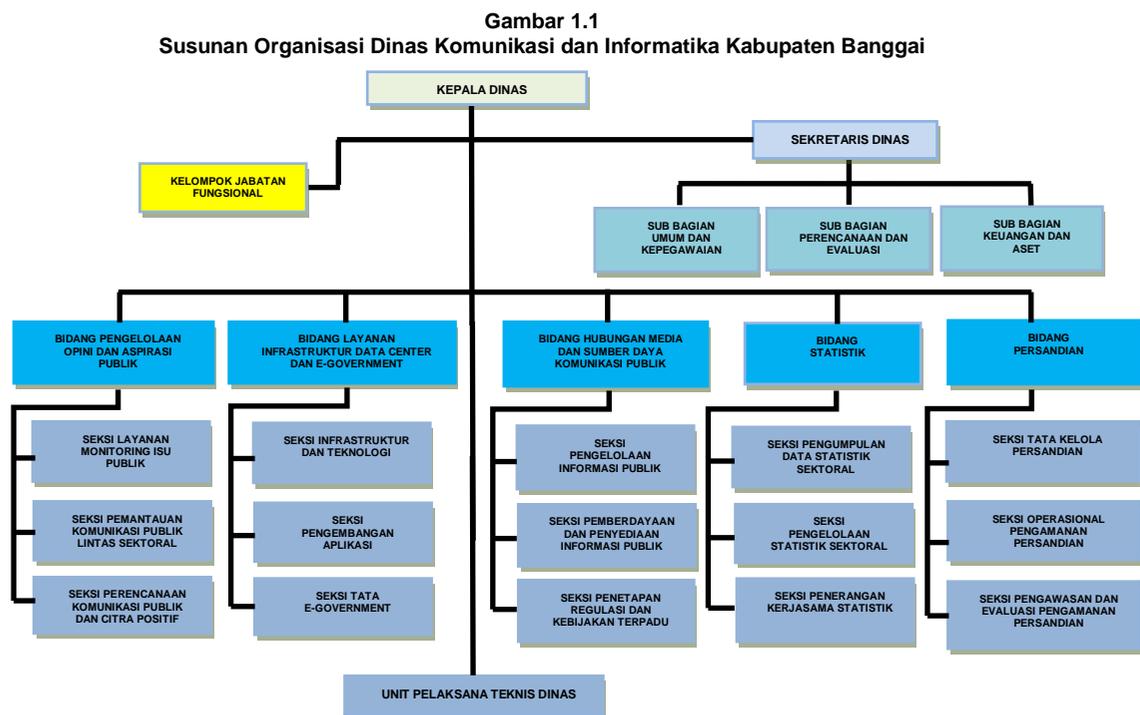
2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
4. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi serta evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
6. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas yang membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang membawahi:
 - a. Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik;
 - b. Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan
 - c. Seksi Perencanaan Komunikasi dan Citra Positif.
4. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Tata e-Government.
5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu.
6. Bidang Statistik yang membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan
 - c. Seksi Penerangan Kerjasama Statistik.

7. Bidang Persandian yang membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Honoror. Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang terinci berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Per 31 Desember 2019)

No.	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	29	64,44
	- Perempuan	16	35,56
2.	Tingkat Pendidikan		
	- SMP / sederajat	-	0,00
	- SMA / sederajat	5	11,11
	- D1 / D2 / D3	2	4,44
	- S1	34	75,56
	- S2	5	8,89
	- S3	-	0,00

3.	Golongan		
	- Golongan IV	5	11,11
	- Golongan III	33	73,33
	- Golongan II	7	15,56
	- Golongan I	-	0,00
4.	Agama		
	- Islam	35	77,78
	- Kristen	9	20,00
	- Hindu	1	2,22
	- Buddha	-	0,00
	- Katholik	-	0,00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kabupaten Banggai

Beberapa permasalahan utama atau isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur TIK yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Batui Selatan, Luwuk Timur, Masama, Balantak Utara dan pesisir Kecamatan Bunta.

2. Kebutuhan akses internet untuk Puskesmas, SMK/SMU dan Desa

Berdasarkan data statistik Tahun 2018, Kabupaten Banggai memiliki 291 Desa, 26 Puskesmas Induk, 22 SMU, dan 12 SMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% Puskesmas Induk, 19 SMU, 9 SMK dan kurang lebih 60% desa di Kabupaten Banggai memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Desa membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik bercocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

3. **Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Perangkat Daerah**

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional. Selain itu, terbatasnya SDM bidang TIK dan keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya penerapan, pelayanan dan pengelolaan e-government perangkat daerah. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi belum optimalnya sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah.

4. **Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis**

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi teknis seperti lembaga penyiaran lokal, Papan Reklame (*Billboard*), Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih ada masyarakat pemohon belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi dan teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. **Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Belum termanfaatkannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi KIM. Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat.

6. **Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware**

Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

7. **Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian**

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

8. **Diseminasi Data Statistik Sektoral yang belum optimal**

Pada prinsipnya belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur di bidang statistik, belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral dengan perangkat-perangkat daerah yang terkait, belum adanya aplikasi untuk mendiseminasikan/ menyajikan informasi data statistik sektoral dan belum adanya SOP yang jelas untuk mendukung penyelenggaraan survei data ataupun kompilasi data statistik sektoral yang ada pada perangkat daerah.

9. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server, media center, ruang rapat dan ruang kerja pegawai yang representatif dan memadai.

10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang layanan Informasi dan komunikasi secara elektronik maupun teknologi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menghasilkan nilai ekonomi riil masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan LKjIP serta gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada tahun 2019.
- Bab IV Penutup, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Lampiran

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses pegawai dan atasan langsungnya secara bersama-sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang harus dilakukan pada satu tahun tertentu, menentukan sasaran kinerja dan target yang harus diukur melalui indikator kinerja, serta mengidentifikasi dan merencanakan cara mengatasi kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan beberapa Misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama serta peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Secara umum langkah-langkah pencapaian yang harus ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut sudah tergambar di dalam RPJMD. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Dari 6 misi tersebut, fokus Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada misi keempat, yaitu “Mewujudkan penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata”. Selain fokus pada misi keempat, Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan tetap mendukung misi pertama pemerintah yaitu “Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, maka salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan teknologi informasi, dengan sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan komunikasi. Hal ini menandakan bahwa bidang komunikasi dan informatika dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan informasi bagi seluruh penduduk, juga memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Banggai.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka upaya-upaya akan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai yakni dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik melalui pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengaplikasikan dan mengintegrasikan sistem pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), mengoptimalisasi pemanfaatan TIK untuk layanan informasi publik, memfasilitasi ketersediaan *smart area* berupa pemasangan wifi gratis di beberapa ruang publik dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah *blankspot*.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan sarana TIK melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan repeater di wilayah blankspot jaringan komunikasi - Fasilitasi penyediaan <i>smart area</i> berupa pemasangan wifi gratis di beberapa ruang publik - Peningkatan kapasitas aksesibilitas internet perangkat daerah (bandwidth) - Pengintegrasian database aptika perangkat daerah ke data center - Pengembangan kapasitas data center (server) - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun <i>mobile</i>
		Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
		Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data statistik sektoral	Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termuktahirkan
		Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah
		Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi	Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah
Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran	Peningkatan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan SDM aparatur, pembinaan/pemantauan kinerja pegawai, peningkatan kinerja pelaporan keuangan dan aset daerah

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) maupun indikator kinerja kegiatan (*input* dan *output*). Target kinerja ini yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Dalam Renja Tahun 2019 telah ditetapkan 12 program dan 46 kegiatan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019

No	Kode	Program / Kegiatan
1	2.10. 2.10.01. 01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
	2.10. 2.10.01. 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
	2.10. 2.10.01. 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	2.10. 2.10.01. 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	2.10. 2.10.01. 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	2.10. 2.10.01. 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	2.10. 2.10.01. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	2.10. 2.10.01. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	2.10. 2.10.01. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	2.10. 2.10.01. 01.17	Penyediaan makanan dan minuman
	2.10. 2.10.01. 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	2.10. 2.10.01. 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	2.10. 2.10.01. 01.20	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran
2	2.10. 2.10.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	2.10. 2.10.01. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	2.10. 2.10.01. 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
	2.10. 2.10.01. 02.10	Pengadaan Mebeleur
	2.10. 2.10.01. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	2.10. 2.10.01. 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	2.10. 2.10.01. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	2.10. 2.10.01. 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	2.10. 2.10.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	2.10. 2.10.01. 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	2.10. 2.10.01. 05.04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

4	2.10. 2.10.01. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	2.10. 2.10.01. 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2.10. 2.10.01. 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
	2.10. 2.10.01. 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	2.10. 2.10.01. 06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
	2.10. 2.10.01. 06.07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
	2.10. 2.10.01. 06.09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
5	2.10. 2.10.01. 07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
	2.10. 2.10.01. 07.03	Penyusunan Profil Perangkat Daerah
6	2.10. 2.10.01. 08	Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
	2.10. 2.10.01. 08.02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
7	2.10. 2.10.01. 15	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan media masa
	2.10. 2.10.01. 15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
	2.10. 2.10.01. 15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi
	2.10. 2.10.01. 15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
	2.10. 2.10.01. 15.12	Pengembangan dan pengelolaan website daerah
	2.10. 2.10.01. 15.13	Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi informatika
8	2.10. 2.10.01. 17	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
	2.10. 2.10.01. 17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
9	2.10. 2.10.01. 18	Program kerjasama informasi dengan media masa
	2.10. 2.10.01. 18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2.10. 2.10.01. 18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
	2.10. 2.10.01. 18.04	Dukungan pemanfaatan informasi warung masyarakat (WIM)
	2.10. 2.10.01. 18.05	Meleaksanakan Pengembangan kelompok komunikasi sosial
	2.10. 2.10.01. 18.10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi
10	2.14. 2.10.01. 16	Program pengembangan data/Informasi Statistik sktor
	2.14. 2.10.01. 16.01	Penyelenggaraan survey data Statistik sektoral
	2.14. 2.10.01. 16.03	Pengolahan dan analisa data Statistik sektoral
	2.14. 2.10.01. 16.04	Penyajian dan Diseminasi data Statistik sektoral
11	2.15. 2.10.01. 15	Program pengelolaan informasi, Elektronika, Sandi telekomunikasi dan informasi teknologi lainnya
	2.15. 2.10.01. 15.01	Fasilitas penyelenggaraan pengelolaan informaasi sandi telematika dan informasi teknologi lainnya
	2.15. 2.10.01. 15.02	Penyelenggaraan dan pengawasan Evaluasi dan pengembangan persandian
	2.15. 2.10.01. 15.03	Fasilitas pembinaan sumber daya persandian
12	2.15. 2.10.01. 16	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
	2.15. 2.10.01. 16.01	Konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dalam dokumen laporan kinerja, capaian kinerja yang diukur oleh setiap instansi pemerintah adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dan Renja Tahun 2019, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	81,26	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	357.050.000,00	IKU
				Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	57.500.000,00	
				Kerjasama Informasi dengan Media Massa	356.156.000,00	
				Pengembangan Data/ Informasi Statistik sektoral	104.689.000,00	
				Pengelolaan Informasi, Elektronik, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	77.716.000,00	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	38.500.000,00	
Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU					991.611.000,00	
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	81	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.726.776.747,76	Non IKU
				Peningkatan Sarana dan Prasarana	484.976.100,00	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	173.171.000,00	
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.747.000,00	
				Pengembangan Sistem Informasi/Data	1.397.500,00	
				Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000,00	
Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Startegis Non IKU					2.464.568.347,76	
Total Pagu Anggaran					3.456.179.347,76	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Kominfo dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2020. Berikut ini capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja Pelayanan
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	81,26	75,66	Baik

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika didasarkan pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. IKM digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai diperoleh simpulan bahwa :

1. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 adalah sebesar **3,03** atau **75,66**. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kategori **B** sehingga kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2019 dapat dikatakan **Baik**.

2. Nilai konversi IKM tahun 2019 belum sesuai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebagaimana ditargetkan dengan nilai IKM **81,26** (mutu pelayanan **A** atau kinerja pelayanan **Sangat Baik**). Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di tahun mendatang.
3. Dari tujuh unsur atau indikator pelayanan yang dinilai melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019, enam di antaranya termasuk dalam kategori baik yakni Prosedur/ Sistem/Mekanisme, Persyaratan, Waktu Pelayanan/ Kompetensi/Perilaku, Produk/Hasil Layanan, Penanganan Pengaduan dan Sarana/ Prasarana. Sedangkan satu indikator lainnya masuk dalam kategori sangat baik adalah Biaya/Tarif.
4. Unsur pelayanan dengan nilai IKM tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 93,31. Hal ini menunjukkan bahwa setiap responden yang mendapatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dipungut biaya atau gratis.
5. Sedangkan unsur dengan nilai terendah yaitu Prosedur/ Sistem/Mekanisme dengan nilai 70,98. Sebenarnya masih termasuk kategori nilai Baik, tetapi perlu menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019.

1. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya jaringan internet pada beberapa OPD yang terkoneksi ke pusat data (server) Dinas Kominfo dan kurangnya anggaran yang mendukung penyediaan jaringan internet khususnya *fiber optic* (FO).
2. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tupoksi dan Penempatan PNS dalam jabatan tidak sesuai kompetensi dan tidak berdasarkan prinsip *the right man in the right place and the right man in the right job*.
3. Masih terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blankspot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Batui Selatan, Luwuk Timur, Masama, Balantak Utara dan pesisir Kecamatan Bunta.

4. Data statistik sektoral yang ada tidak memiliki rekomendasi dari BPS. Hal ini disebabkan oleh belum adanya MoU kerjasama antara Dinas Kominfo dengan BPS.
5. Penyajian data statistik sektoral belum menggunakan teknologi informasi (masih berupa dokumen). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aplikasi untuk menyajikan data statistik sektoral. Anggaran yang tersedia belum memadai untuk pengadaan aplikasi yang menyajikan data statistik sektoral.
6. SDM kurang berkompeten di bidang pengelolaan data statistik sektoral. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan di bidang statistik sektoral.
7. Tidak ada SDM sandi dan peralatan persandian yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Hal ini disebabkan Petugas Sandiman telah dimutasi/ dipromosi untuk menduduki jabatan eselon IV di Bidang Hubungan Media dan SDKP.
8. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemda tidak jelas. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda) terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemda

Beberapa solusi sebagai upaya alternatif yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur komunikasi dan informatika (jaringan internet) melalui penyediaan jaringan serat optik pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala tidak terintegrasinya sistem database aplikasi perangkat daerah ke data center Dinas Komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis Serat Optik (FO) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja seluruh perangkat daerah dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal;
2. Koordinasi dengan BKPSDM dan peningkatan SDM aparatur dengan cara mengikutsertakan ASN dalam pelatihan bidang TIK;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi melalui penyediaan alat penguat sinyal (repeater) pada wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blankspot area*). Selain itu, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.
4. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai;

5. Koordinasi dengan BKPSDM dan peningkatan SDM aparatur dengan cara mengikutsertakan ASN dalam pelatihan bidang TIK;
6. Koordinasi dengan BSSN dan BKPSDM. Selain itu, mengikutsertakan ASN dalam Diklat Sandiman;
7. Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persandian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.134.121.193 atau 84,56% dari target anggaran sebesar Rp.3.706.179.347,76. Persentase realisasi anggaran Belanja langsung Tahun 2019 ini, menurun jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2018 sebesar 94,43% dan realisasi tahun 2017 sebesar 99,20%. Analisis realisasi dan capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2019 selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

Program 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
------------------	---

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai merupakan satu-satunya komponen dalam kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat. Sampai dengan 31 Desember 2019, dapat terealisasi 100% dari target kinerja sasaran sebanyak 1.120 lembar atau sejumlah Rp.5.040.000. Kinerja kegiatan ini dapat dikatakan relatif sangat baik.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Komponen belanja dari kegiatan ini terdiri atas jasa air, listrik dan sewa bandwidth internet kantor. Sampai dengan 31 Desember 2019 dapat terealisasi sebesar Rp. 112.225.241 atau 97,89% dari yang ditargetkan sebesar Rp.114.650.000. Realisasi anggaran kegiatan ini 2019 terbilang sangat baik.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Realisasi kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp.9.616.600 atau 74,26% dari target yang ditetapkan yang meliputi pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2020 kiranya dapat dilakukan proyeksi dan rasionalisasi terhadap kebutuhan/ penggunaan listrik yang lebih baik.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Realisasi kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp.64.000.000 atau 100% dari target yang ditetapkan yang meliputi komponen honorarium petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan/ bahan pembersih kantor. Realisasi anggaran kegiatan ini 2019 sangat baik.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Realisasi anggaran kegiatan penyediaan ATK pada tahun 2019 mencapai Rp.31.213.000 atau 100% dari target yang direncanakan. Realisasi anggaran kegiatan ini sangat efektif sesuai dengan perencanaan kebutuhan.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Realisasi kegiatan ini terdiri atas pencetakan blangko disposisi dan foto copy berkas/ dokumen terealisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp.16.600.000. Capaian realisasi dan target kinerja kegiatan ini sangat baik.

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.12.598.500,- atau 99,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.12.618.500. Capaian tahun ini relatif sangat baik.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.000.000. Capaian tahun ini relatif sangat baik. Hal ini sungguh positif mengingat budaya membaca dan mencari informasi umum di kalangan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sangatlah baik sehingga ikut menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada.

9. Penyediaan makanan dan minuman

Pada tahun 2019, realisasi anggaran penyediaan makanan/minuman untuk kebutuhan kegiatan rapat kantor sebanyak 1672 dos atau 100% dari target sebesar Rp.39.292.000 berupa makanan/ minuman rapat yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan rapat mulai dari rapat koordinasi rutin setiap bulan maupun rapat internal pembahasan perencanaan anggaran.

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pada tahun 2019, realisasi kegiatan ini mencapai Rp.207.404.940 atau 95,5% dari target anggaran Rp.217.175.600. Hal ini dapat tercapai karena didukung dengan perencanaan yang sangat baik untuk beberapa pelaksanaan kegiatan koordinasi ke luar daerah.

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pada tahun 2019, realisasi kegiatan ini mencapai 92,82% atau sebesar Rp.140.400.000 dari target sebesar Rp.151.266.597,76. Hal ini dapat tercapai karena didukung oleh adanya perencanaan yang sangat baik untuk beberapa pelaksanaan kegiatan di dalam daerah.

12. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

Kegiatan ini terealisasi Rp.540.000.000,- atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Seluruh anggaran ini diperuntukkan untuk mengakomodir honorarium bagi 30 orang pegawai honorer administratif.

Program 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
------------------	--

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Sampai 31 Desember 2019, kegiatan ini terealisasi Rp. 51.831.500,- atau 100% dari target anggaran yang ditetapkan. Rincian realisasi kegiatan terdiri atas 1 buah Brankas, 1 Unit Genset 5K, 1 unit Mesin Pemotong Rumput, 4 unit *Air Conditioner* (AC), 1 set alat pengeras suara/toa mobil, 1 set amplifier toa / inverter, dan 1 set Mic wireless.

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Sampai 31 Desember 2019, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 140.949.400 atau 99,89% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 141.099.400. Rincian realisasi kegiatan terdiri atas 3 jenis yaitu 2 unit Laptop, 1 Unit UPS dan 1 paket Kamera Digital + Tripod.

3. Pengadaan meubelair

Pada tahun 2019, realisasi kegiatan mencapai 100% dengan anggaran Rp. 26.606.250, dengan rincian realisasi kegiatan terdiri atas 3 jenis yaitu 50 buah kursi rapat, 1 set kursi tamu/sofa, dan 1 buah lemari arsip.

4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pada tahun 2019, realisasi kegiatan mencapai 100% dengan anggaran Rp. 56.400.000, yang terdiri atas 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 7 unit kendaraan roda dua.

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Untuk jasa perbaikan atau servis 13 unit alat penyejuk ruangan (AC) realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 mencapai 100% dari target anggaran Rp.6.500.000.

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 mencapai Rp.19.207.000 atau hanya sebesar 37,59% dari target anggaran Rp.51.100.000, yang hanya dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan atau servis Komputer/PC dan Printer.

Program 3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
------------------	---

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

Pada tahun 2019, Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 130.076.814 atau 93,45% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.139.200.000. Anggaran kegiatan ini sepenuhnya dibutuhkan untuk kontribusi pegawai yang mengikuti pelatihan. Terwujudnya kegiatan ini merupakan komitmen Kepala Dinas Kominfo yang selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Pada tahun 2019, Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 3.371.000 atau 84,89% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 3.971.000. Anggaran kegiatan ini sepenuhnya dibutuhkan untuk kebutuhan penyusunan dokumen kepegawaian berupa Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Pegawai (SKP).

Program 4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
------------------	---

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp. 2.522.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini sendiri diperuntukkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan TEPR. Dengan perencanaan yang lebih matang dan ditunjang kelengkapan data, maka penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu oleh tim penyusun.

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp.1.560.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena Laporan prognosis dan realisasi anggaran dapat disusun secara efektif, tepat waktu dan sesuai standar akuntansi.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp.1.105.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena Laporan Keuangan Akhir Tahun dapat disusun secara efektif, tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Pada tahun 2019, realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 67.474.000 atau 98,72% dari target anggaran Rp. 68.350.000. Kegiatan ini direalisasikan dengan *output* 5 dokumen perencanaan/ anggaran yaitu DPA Tahun 2019, RKPA Tahun 2019, DPPA Tahun 2019, Renja Tahun 2020, dan RKA Tahun 2020. Efektifnya capaian kinerja penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran ini sebenarnya karena adanya koordinasi, evaluasi, dan kerja sama tim yang baik di internal sub bagian perencanaan dan evaluasi.

5. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp.1.105.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena dokumen RKBU dapat disusun secara efektif, tepat waktu dan sesuai standar kebutuhan barang.

6. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp.1.105.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik karena Laporan Keuangan Akhir Tahun dapat disusun secara efektif, tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Program 5	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
------------------	---

1. Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Pada tahun 2019, realisasi kegiatan ini mencapai sebesar Rp. 1.397.500 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan. Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan Dokumen profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

Program 6	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
------------------	---

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp. 2.500.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini sendiri diperuntukkan untuk evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan pengendalian kegiatan, maka penyusunan efektifitas pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik.

Program 7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
------------------	---

Capaian indikator kinerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebagai berikut **Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government** sebesar 69,64 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen.

Alokasi anggaran Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebesar Rp.1.292.050.000 dengan realisasi sebesar Rp.813.868.446. setara dengan 62,99% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Kegiatan Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.000.000 atau setara dengan 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah lembaga penyiaran dan KMIP daerah yang dilakukan pengawasan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

2. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.754.650.000 dan realisasi sebesar Rp.616.744.986 atau setara dengan 81,73%. **Output** kegiatan adalah Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK yang dikembangkan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya layanan komunikasi dan informatika. Secara *output*, kegiatan ini terealisasi untuk penyediaan infrastruktur TIK dan sarana penunjang TIK berupa Repeater (Alat Penguat Signal Seluler) di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Pembuatan Pagar Pengaman serta penyambungan jaringan listrik untuk tower repeater yang telah terpasang di Desa Kuntang, Kecamatan Balantak Utara dan Penyediaan wifi publik (internet gratis) di 5 titik area publik.

3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000 dan realisasi sebesar Rp.66.931.000 atau setara dengan 83,66 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

4. Pengembangan dan Pengelolaan Website Daerah

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Daerah yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.900.000 dan realisasi sebesar Rp.17.400.000 atau setara dengan 72,80 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah situs web daerah yang terkelola dengan baik. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya layanan komunikasi dan Informatika.

5. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.383.500.000 dan realisasi sebesar Rp.62.792.460 atau setara dengan 16,37 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah aplikasi Informatika yang dikembangkan dan dikelola. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya layanan komunikasi dan Informatika.

Program 8	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
------------------	---

Capaian indikator kinerja Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebesar 50 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Alokasi anggaran Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi adalah sebesar Rp.57.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.56.803.000 setara dengan 98,79 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 56.803.000 atau setara dengan 98,79%. **Output** kegiatan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang TIK. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang TIK.

Program 9	Kerja Sama dengan Media Massa
------------------	--------------------------------------

Capaian indikator kinerja Program kerjasama informasi dengan mass media sebesar 94,54 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Alokasi anggaran Program kerjasama informasi dengan mass media adalah sebesar Rp.341.656.000 dengan realisasi sebesar Rp. 323.014.450 setara dengan 94,54 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.500.000 dan realisasi sebesar Rp.148.439.800 atau setara dengan 98,63%. **Output** kegiatan adalah Jumlah informasi yang dipublikasi. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penyebarluasan Informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.500.000 dan realisasi sebesar Rp.100.051.000 atau setara dengan 99,55%. **Output** kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan komunikasi publik dan citra positif. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

3. Dukungan pemanfaatan informasi warung masyarakat (WIM)

Kegiatan Dukungan pemanfaatan informasi warung masyarakat (WIM) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.156.000 dan realisasi sebesar Rp Rp.3.256.000 atau setara dengan 17,00%. **Output** kegiatan adalah Jumlah Warung Informasi masyarakat (WIM) yang difasilitasi. **Outcome** kegiatan adalah Terfasilitasinya pengembangan dan pembinaan kemitraan kelompok komunikasi sosial.

5. Melaksanakan pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial

Kegiatan Melaksanakan pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.500.000 dan realisasi sebesar Rp.36.439.800 atau setara dengan 99,84% . **Output** kegiatan adalah Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi. **Outcome** kegiatan adalah Terfasilitasinya pengembangan dan pembinaan kemitraan kelompok komunikasi sosial.

6. Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi

Kegiatan Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan realisasi sebesar Rp.34.827.850 atau setara dengan 99,51%. **Output** kegiatan adalah Jumlah radio/ tv kabel yang dikelola dan difasilitasi. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik.

Program 10	Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral
-------------------	---

Capaian indikator kinerja Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral sebagai berikut Persentase Jenis Data Statistik Sektoral yang terpublikasi sebesar 20 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen.

Alokasi anggaran Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral adalah sebesar Rp.104.689.000 dengan realisasi sebesar Rp.101.847.100 setara dengan 97,29 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.844.000 dan realisasi sebesar Rp.69.575.000 atau setara dengan 99,61%. **Output** kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil survei data statistik sektoral. **Outcome** kegiatan adalah Tersedianya dokumen hasil survei data statistik sektoral yang akurat.

2. Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral

Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.945.000 dan realisasi sebesar Rp. 10.945.000 atau setara dengan 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil olah data dan analisa data statistik sektoral. **Outcome** kegiatan adalah Tersedianya dokumen hasil analisis data statistik sektoral secara akurat.

3. Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Kegiatan Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.900.000 dan realisasi sebesar Rp.21.327.100 atau setara dengan 89,23 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disajikan. **Outcome** kegiatan adalah Tersedianya data statistik sektoral yang termuktahirkan.

Program 11	Pengelolaan Informasi, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi lainnya
-------------------	--

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya sebagai berikut Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengamanan informasi elektronik sesuai standar SOC sebesar 12,5 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 8,9 persen. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya adalah sebesar Rp. 92.216.000 dengan realisasi sebesar Rp. 89.599.426. setara dengan 97,16 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi, sandi telematika dan informasi teknologi lainnya

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.350.000 dan realisasi sebesar Rp. 26.350.000 atau setara dengan 100%. **Output** kegiatan adalah Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan informasi elektronik sesuai standar SOC. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya penerapan pengamanan informasi elektronik sesuai standar SOC.

2. **Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi, sandi telematika dan informasi teknologi lainnya**

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.866.000 dan realisasi sebesar Rp. 35.850.000 atau setara dengan 99,96%. **Output** kegiatan adalah Jumlah aplikasi yang sudah menggunakan kunci sistem sandi pada perangkat daerah. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya keamanan data/ informasi pada aplikasi perangkat daerah.

3. **Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian**

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000 dan realisasi sebesar Rp.27.399.426 atau setara dengan 91,33 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat sandiman. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya kompetensi SDM persandian dalam pengelolaan informasi elektronik.

Program 12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
-------------------	--

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah sebesar Rp. 54.000.000 dan realisasi sebesar Rp Rp. 53.978.026 atau setara dengan 99,96 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. **Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah**

Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.000.000 dan realisasi sebesar Rp Rp. 53.978.026 atau setara dengan 99,96 %. **Output** kegiatan adalah Jumlah konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan persandian berdasarkan hasil tindak lanjut konsultasi dan koordinasi.

Bab IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini adalah wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2019. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun mendatang. Dari LKjIP ini dapat diketahui gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 melalui capaian target kinerja dan realisasi anggaran. Selain gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh simpulan bahwa :

1. Capaian Indikator kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi dan informatika tahun 2019 sebesar **75,66** dengan Mutu pelayanan **B** atau kinerja pelayanan **Baik**. Hal ini belum sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar **81,26**.
2. Capaian Indikator kinerja lainnya yaitu Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo adalah **61,77** dengan kategori akuntabilitas kinerja **B**. Hal ini belum sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar **81** dengan kategori akuntabilitas kinerja **A**.
3. Indikator kinerja di atas dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan realisasi anggaran Belanja Langsung Rp.3.134.121.193 atau 84,56% dari target anggaran sebesar Rp.3.706.179.347,76.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Sesuai analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama yaitu IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika tahun 2019, maka pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dapat dikategorikan baik, namun perlu digarisbawahi bahwa kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan karena masih ada sub indikator yang indeksinya menunjukkan kinerjanya masih kurang. Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada tahun-tahun mendatang, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memprioritaskan pada sub indikator kecepatan waktu dalam pelayanan. Masyarakat semakin ingin dimudahkan dengan cara efektif dan efisien dari segi waktu pelayanan.

2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur terutama dalam hal pelayanan publik. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk mempedomani prinsip pelayanan prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas aduan yang disediakan. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan penanganan aduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.
4. Perlunya komitmen dan upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai secara intensif dan berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
5. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
6. Tetap berpedoman pada mekanisme dan SOP pelaksanaan kegiatan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
7. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada tahun mendatang. Amin